

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 2,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi triwulan III 2021 yang tercatat 1,40% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga di sebagian besar kelompok barang. Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama (1,87%; yoy). Selanjutnya, peningkatan tekanan harga pada triwulan I 2022 diperkirakan menurun dibandingkan kondisi pada triwulan IV. Hal ini didorong oleh normalisasi permintaan pasca Galungan dan Kuningan, kebijakan pembatalan pelarangan penjualan minyak goreng curah dan peningkatan pasokan akibat panen raya pada beberapa komoditas hortikultura. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Bali akan terus mengawal pergerakan harga sehingga inflasi tetap terkendali.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan pengendalian inflasi pada Triwulan IV 2021 adalah kenaikan signifikan pada kelompok volatile food. Secara umum, peningkatan harga disebabkan oleh peningkatan permintaan di penghujung 2020 seiring dengan adanya cuti bersama, HBKN, dan tahun baru. Selain itu, peningkatan harga komoditas hortikultura termasuk sayuran dan buah-buahan juga disebabkan oleh keterbatasan pasokan akibat curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, peningkatan harga daging ayam juga sesuai dengan prakiraan, di mana kebijakan cutting HE berdampak signifikan pada harga di saat terjadi peningkatan jumlah wisatawan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada triwulan IV 2021 di sejumlah daerah berfokus pada pemantauan ketersediaan pasokan dan pemantauan harga bahan pangan dalam rangkaantisipasi peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal serta Tahun Baru. Untuk kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID di Provinsi Bali telah diadakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada triwulan IV 2021. Dalam kerangka kebijakan pengendalian inflasi 4K, khususnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi, TPID di wilayah Bali yaitu TPID Kabupaten Bangli telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 November 2021. Dengan adanya pelaksanaan KAD, dapat memberikan payung hukum dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, terutama kerja sama B2B (business-to-business) yang sudah terjalin antar pelaku usaha di Bangli dan Klungkung. Terkait komoditas yang berpotensi diperdagangkan, Kab. Bangli memiliki sejumlah produk unggulan diantaranya bawang merah, sayur mayur, telur ayam, kopi arabika kintamani dan jeruk. Selain itu, telah dilaksanakan juga penandatanganan kerja sama pengadaan bahan makanan secara B2B antara Marriot Indonesia Group dengan 2 (dua) pelaku usaha di Bali, yaitu Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika dan UD Aditya Poultry Shop pada 30 November 2021

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Bali pada Triwulan IV 2021 adalah sebagai berikut: a) Perluasan pelaksanaan kerja sama antar daerah oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/ Kabupaten, baik intra provinsi maupun antar provinsi untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit. b) Mendorong implementasi teknologi baik dari sisi hulu

maupun hilir, serta dalam pemasaran komoditas khususnya pada komoditas pertanian. Selain itu, diperlukan pengembangan produk olahan serta himbauan penggunaan produk olahan, seperti cabai, agar permintaan bahan baku segar yang rentan mengalami fluktuasi harga dapat diminimalkan. c) Pentingnya kualitas data yang akurat dan riil (terutama stok neraca pangan) pada website SIGAPURA.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Bali pada Triwulan IV 2020 adalah sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholders yang tergabung dalam TPID melakukan perumusan dan implementasi roadmap pengendalian inflasi di masing-masing Provinsi yang sudah ditandatangani ketua TPID Provinsi, dalam hal ini Gubernur Provinsi dan melakukan pelaporan evaluasi roadmap secara triwulanan. b) Mengidentifikasi komoditas yang sering mengalami kenaikan harga dan mewajibkan pedagang besar untuk memberikan pantuan terhadap stok harga sehingga terlihat data riil pada stok ketersediaan pangan. c) Pemanfaatan website SIGAPURA untuk pemberian informasi simetris dan edukasi belanja bijak bagi masyarakat. d) Pembuatan food station untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan di kabupaten/kota dengan perumda sebagai pengelola. Selain itu, food station juga perlu dilengkapi dengan CAS (Controlled Atmosphere Storage) untuk memperpanjang masa penyimpanan bahan pangan terutama hortikultura